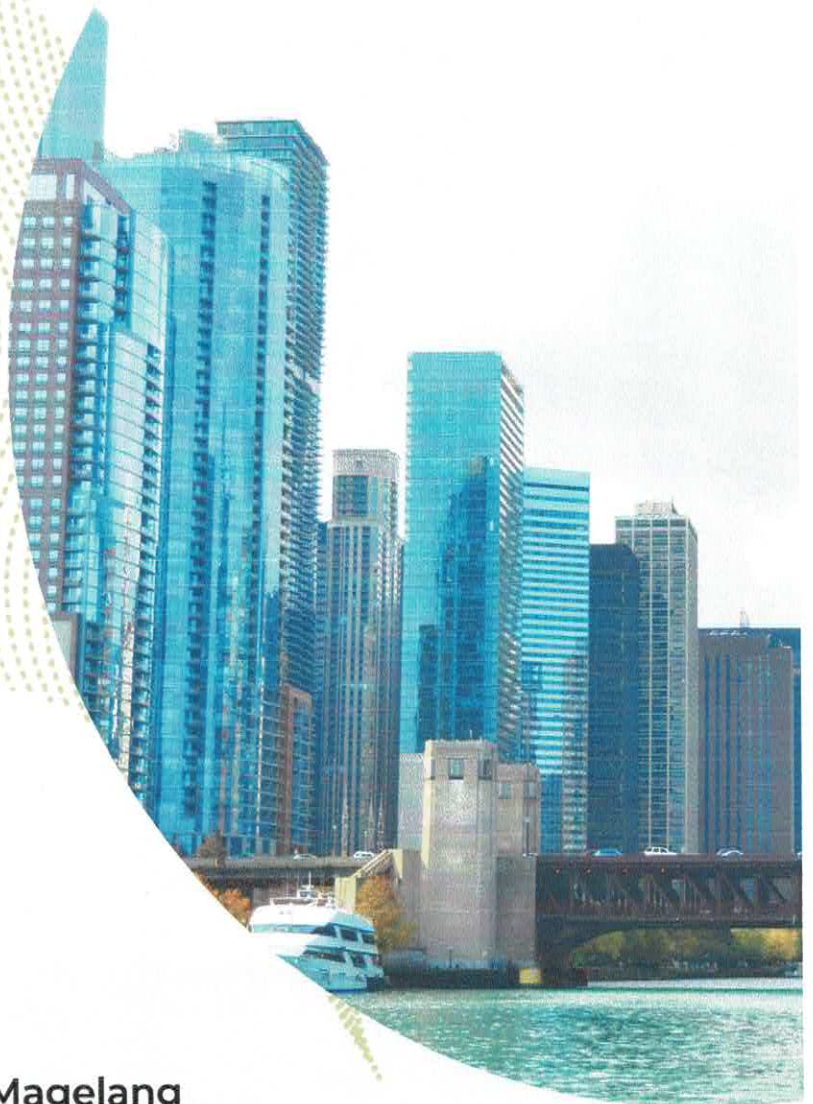




RENCANA STRATEGIS 2025-2029

(RENSTRA)



Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang
Tahun 2025 - 2029



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan	10
Tabel 2.2	Jenjang Pendidikan Sumber Daya Manusia Pada Dinas Perhubungan	13
Tabel 2.3	Sumber Daya Manusia pada Dinas Perhubungan Menurut Golongan	14
Tabel 2.4	Sumber Daya Manusia pada Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin	14
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan	15
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2019 – 2024	29
Tabel 2.7	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2020 – 2024	30
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan .	31
Tabel 2.9	Simpulan Isu Strategis Dinas Perhubungan	34
Gambar 3.1	Konsep Renstra Dinas Perhubungan	37
Tabel 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Perhubungan	38
Tabel 3.3	Rumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan	39
Tabel 3.4	Penahapan Renstra Dinas Perhubungan	40
Tabel 3.5	Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan ...	41
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Dinas Perhubungan	43
Tabel 4.2	Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan.....	44
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2025 – 2029	50
Tabel 4.4	Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	58
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029	59
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029	60



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Soekarno-Hatta No. 179 Nampan, Bumirejo, Mungkid 56511
Telp. (0293) 788407 Fax. (0293) 3281091
Email : dishub@magelangkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Imam Basori, S.Sos.,M.Si

NIP : 19701115 199003 1 003

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

Berdasar SK Bupati Nomor 180.182/820/14/KEP/2022 Bertugas untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

Berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta No. 179 Nampan Bumirejo Mungkid Kabupaten Magelang

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2029;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Magelang

Imam Basori, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701115 199003 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 - 2024, maka dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029, Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2025 - 2029 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Dinas Perhubungan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan serta berpedoman pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Dinas Perhubungan dan lintas Dinas Perhubungan yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Perhubungan Tahun 2025 - 2029 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2029, penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2029.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Salinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 123);
22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 65).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029 ini adalah untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan jangka menengah Dinas Perhubungan dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan di Dinas Perhubungan.

Tujuan penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan selama kurun waktu 2025 - 2029;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara dengan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah dan menjadi pedoman bagi penyusunan Renja.

1.4. Sistematikan Penulisan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang pengertian Renstra, fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta keterkaitan Renstra dengan RPJMD, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Bab ini memaparkan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan PD, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD (SDM, aset/modal), memuat struktur organisasi, tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme) serta tupoksi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, hambatan utama serta solusi untuk mengatasinya, permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi terkait visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, faktor penghambat dan pendorong untuk mencapai visi dan misi dan kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran tahun 2025 - 2029 dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan dan merumuskan strategi dan arah kebijakan PD dalam lima tahun mendatang dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini merumuskan rencana program dan kegiatan, dan pendanaan indikatif untuk tahun 2025 – 2029, merumuskan indikator kinerja utama, indikator kinerja, definisi operasional, formulasi dan komponen pembentuk indikator program PD.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi dan peran dari dokumen Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar hukum Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (eselon II-b) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.

Adapun tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang meliputi lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknis, prasarana sarana, pengelolaan kesekretariatan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

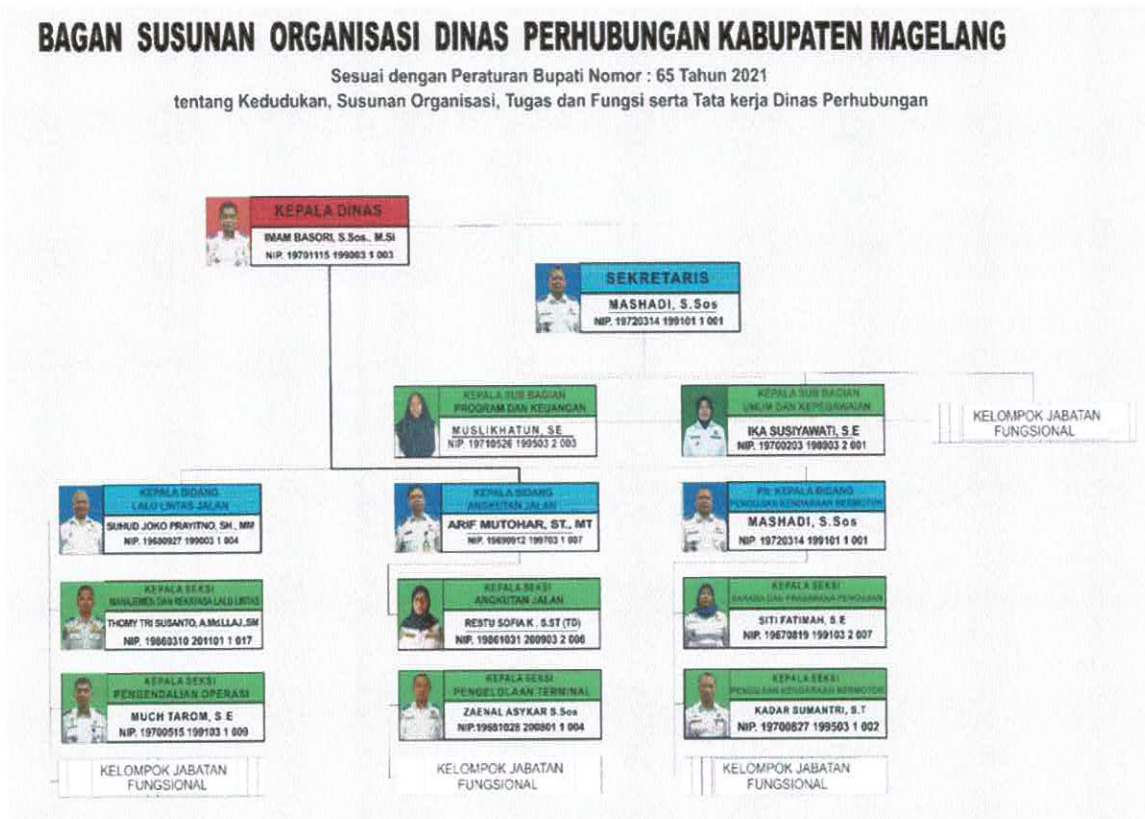
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang membawahi Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang sebagai berikut :

- a. Sekretariat membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu :
 1. Subbagian Program dan Keuangan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- b. Bidang Lalu Lintas Jalan membawai 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 2. Seksi Pengendalian Operasi
- c. Bidang Angkutan Jalan membawai 2 (dua) Seksi, yaitu:
 - 1. Seksi Angkutan Jalan
 - 2. Seksi Pengelolaan Terminal
- d. Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor membawai 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pengujian

Gambar Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sesuaidalam Lampiran I Peraturan Bupati Magelang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan dapat kami sajikanpada gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan



b. Sumber Daya Dinas Perhubungan

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh adanya modal dasar yaitu Sumber Daya Manusia (*human capital*) yang dimiliki. Keberhasilan pencapaian kinerja tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan yang mendalam (*hardskill* atau *hard competence*), akan tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap, watak dan perilaku yang dimiliki oleh para pegawai dalam menghadapi pekerjaan (*softskill*). Maka dari itu, pengembangan pegawai agar bisa menjadi modal dasar untuk tercapainya sebuah tujuan, sangat diperlukan adanya sumber daya manusia yang handal, karena dengan adanya Sumber Daya Manusia yang handal akan menjadi bagian penting dalam pengelolaan organisasi. Untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia yang handal, maka perlu diadakan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan *human capital* meliputi kegiatan identifikasi jenis pekerjaan strategis yang ada, mendefinisikan profil kompetensi yang harus dimiliki Sumber Daya Manusia serta membuat kalkulasi (*assessment*) atas kompetensi Sumber Daya Manusia yang ada dan membangun program pengembangan Sumber Daya Manusia (*human capital development*) yang meliputi pelatihan dan penilaian kesiapan organisasi.

Dalam posisinya yang sangat menentukan sebagai *agent of change*. Sumber Daya Manusia dituntut memiliki kemampuan yang memadai, baik dari segi ilmu pengetahuan (*basic competence*), keterampilan dan keahlian (*value of competence*), maupun profesionalitas (*code of conduct*). Faktor kemampuan tersebut dibutuhkan di setiap bidang tugas guna mendukung terwujudnya peran Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan demi tercapainya tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, untuk pencapaian tujuan organisasi pada tingkat optimum, yaitu adanya tuntutan terhadap faktor kemampuan Sumber Daya Manusia menyangkut ketiga hal yaitu kemampuan, keterampilan dan keahlian serta profesionalitas perlu dijawab dengan proses

penyiapan Sumber Daya Manusia secara baik dan profesional. Adapun langkah yang perlu dilakukan terkait dengan faktor kemampuan adalah menyandingkan peta kompetensi Sumber Daya Manusia yang ada dengan kebutuhan yang diinginkan. Dengan demikian perlu proses kalkulasi (*assessment*) kompetensi secara benar.

Memperhatikan kebutuhan Sumber Daya Manusia unggul dengan spesifikasi dan diversifikasi kompetensinya, diyakini bahwa perencanaan Sumber Daya Manusia yang baik sejak pengadaan, pembinaan, pengembangan serta penajaman keahlian merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan seimbang, tidak saja dengan tuntutan kebutuhannya, tetapi juga dengan faktor-faktor yang dapat memotivasi Sumber Daya Manusia untuk menunjukkan kinerja sesuai yang diharapkan.

Dengan kedudukan tersebut, Sumber Daya Manusia menempati posisi sentral di antara 4 (empat) aspek penting lainnya, yakni aspek hukum, aspek organisasi, aspek sistem dan prosedur dan aspek sarana dan prasarana. Upaya memahami posisi Sumber Daya Manusia saat ini baik dari segi kuantitas, kualitas, ragam kompetensi maupun penyebarannya sangat penting dalam mempersiapkan kelangsungan proses perencanaan dan pertumbuhan Sumber Daya Manusia yang diinginkan untuk kurun waktu tertentu di masa datang, seiring dengan tuntutan kebutuhan pencapaian tujuan organisasi.

Dengan mengetahui posisi tersebut kita dapat mengukur kemampuan serta menjadikan posisi tersebut sebagai barometer dalam penetapan target pencapaian tiap-tiap sasaran yang membutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia. Peta pencapaian sasaran akan dengan sendirinya menunjukkan apa dan berapa kekuatan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dalam kurun tertentu dan bagaimana pertumbuhan yang diharapkan terjadi. Oleh karena itu, kejelasan kebutuhan Sumber Daya Manusia terkait dengan jumlah dan komposisi turut pula menentukan langkah

pengelolaan yang harus dilakukan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kejelasan tersebut di sisi lain membantu dan memungkinkan kita dapat memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada secara optimal dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi dan terkendali. Dengan demikian, proses pertumbuhan Sumber Daya Manusia dapat berjalan secara terencana dan terukur.

Dukungan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang sangat penting, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai, maka upaya untuk mencapai tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang akan semakin mudah.

Dilihat dari jenjang pendidikannya, SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang mayoritas merupakan lulusan Sarjana S1 (37%), SLTA (35%), S2 (9%), D3 (9 %), Diploma II (11%). Lebih rinci bisa dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Jenjang Pendidikan Sumber Daya Manusia
Pada Dinas Perhubungan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	Prosentase (%)
1	Pasca Sarjana (S.2)	4	9
2	Sarjana (S.1)	17	37
3	Diploma III/ Akademi	4	9
4	Diploma II	5	11
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir (SLTA)	16	35
6	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	0	0
	TOTAL	46	100

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang bulan Juni 2025

Sedangkan SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dilihat dari golongan atau kepangkatannya, mayoritas berada pada golongan III sebanyak 50%. Lebih rinci bisa dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia Menurut Golongan
pada Dinas Perhubungan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1.	Golongan IV	4	9
2.	Golongan III	23	50
3.	Golongan II	13	28
4.	PPPK	6	13
JUMLAH		46	100

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten
Magelang bulan Juni 2025

Sementara itu jika ditinjau dari sisi Gender, maka Sumber Daya Manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang terdapat 31 pegawai berjenis kelamin laki-laki yang terdiri dari 8 pejabat struktural dan 5 fungsional penguji dan 18 jabatan fungsional umum. Sementara itu jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 15 orang yang terdiri dari 4 pejabat struktural 5 jabatan fungsional penguji, dan 6 fungsional umum . Komposisi tersebut tersaji pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Kelamin
pada Dinas Perhubungan

No	Eselon	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II	1	0	1
2.	Eselon III	3	0	3
3.	Eselon IV	4	4	8
4.	Fungsional Penguji Kendaraan	5	5	10
5.	Fungsional Umum	18	6	24
Jumlah		31	15	46

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten
Magelang bulan Juni 2025

Untuk kelancaran pencapaian tujuan/hasil tidak bisa lepas dari tersedianya sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana sangat berperan untuk mendukung kinerja Sumber Daya Manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang meliputi berbagai macam jenis sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
ALAT ANGKUTAN.GEROBAK DORONG	18
GEROBAK SAMPAH DORONG	6
GEROBAK TARIK	5
HF -HARDWARE	7
ALAT ANGKUTAN.GEROBAK TARIK	1
GEROBAK TARIK	1
ALAT ANGKUTAN.LAIN-LAIN	1
TOYOTA HILUX PICK UP	1
ALAT ANGKUTAN.PICK UP	1
DAIHATSU GRAND MAX S402RP-PMRFJJ-KF	1
ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	27
Honda / Supra X 125 CW AFX12U21CDB	1
Honda Revo	1
HONDA REVO NF 11B2D1	4
HONDA REVO NF100D	1
HONDA REVO NF100TD	1
HONDA VERZA GL15B1DF M/T	1
HONDA WIN MCB	1
KAWASAKI LX150 E CKD	2
Yamaha Jupiter MX 135 LC	2
YAMAHA NEW VIXION 2TP	1
YAMAHA NEW VIXION 2TP	1
YAMAHA NMAX 2DP NON ABS	1
YAMAHA NMAX ADP NON ABS	1
YAMAHA VEGA RR 35D	5
YAMAHA VEGA RR 5D9	3
YAMAHA VIXION 3CKV-IXION	1
ALAT ANGKUTAN.STATION WAGON	6
ISUZU TBR 54F TURBO LS PANTHER	1
MITSUBISHI	1
NISSAN NP300 NAVARA SL 2.5	1
TOYOTA INNOVA E	2
TOYOTA INNOVA G	1
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR.DONGKRAK MEKANIK	1
WT	1
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR.GERGAJI CHAIN SAW	1
FIRMAN FCS58XPNEW	1
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR.GLOBAL POSITIONING SYSTEM	4
FLOOR JACK	1
GPS / GARMIN	3
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR.MESIN GERGAJI	1
STIHL	1

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR.MESIN KOMPRESOR	3
SHARK	2
Shark dengan Mesin Honda GS 5.0	1
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR.PERKAKAS BENGKEL KERJA.KUNCI PIPA	1
PROTECH	1
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR.PERKAKAS BENGKEL KERJA.KUNCI SHOCK	1
MC TECH	1
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR.PHASE METER	3
METERAN BERODA DIGITAL	3
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR.TIMBANGAN JEMBATAN CAPASITAS 10 TON	1
SBX-1 KL	1
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR.TOOL KIT SET	2
TOOLS KIT SET PKB	1
TOOLSET	1
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR.TOOLKIT PEMELIHARAAN	1
KRISBOW	1
ALAT BESAR.LAIN-LAIN	12
Automatic Head Light Tester	1
Banzai	2
Bogie Roller untuk Speedometer Tester	1
BRAKE TESTER.AXEL LOAD METER.SIDESLIP TESTER	1
Durracell	1
HINO CRANE (WU342R-HKMTJD3 130 HD)	1
JOINT PLAY DETECTOR	1
Lakoni	1
Peralatan Kerja dan Bantu	1
Sound Level Meter	1
SPEDOMETER TESTER	1
ALAT BESAR.STATIONARY GENERATING SET	1
WINSTON	1
ALAT BESAR.TRUCK CRANE	1
ISUZU / MBRG/LIGHT TRUCK CRANE	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. MEUBLIAIR .MEJA KANTOR	1
TANPA MERK	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.A.C. SENTRAL	1
GLACIO	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.A.C. SPLIT	1
LG ELECTRONIK	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.LAIN-LAIN	1
SEKAT RUANGAN TRIPLEK	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.LCD PROYEKTOR	2
EPSON-EB-X350	1
VIEW SONIC-PJD5266	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.SPEAKER AKTIF	1

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
Aubern Powered Powered Portable Speaker BE-12CXR	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT PEMADAM/PORTABLE	4
Onfire	4
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT PENDINGIN .AC UNIT	12
AC LG	1
AC 1/2 PK	1
AC DAIKIN	1
AC DIKIN	1
AC PANASONIC	1
AC SHARP	2
Panasonic	3
SHARP	2
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KTR.RAK BUKU	10
RAK BESI	10
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).ALAT PEMANAS	1
MODENA ES 100H	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).CAMERA DIGITAL	20
LAMPU LED 100 WATT	18
LAMPU LED 90 WATT SMART LAMP-	1
PENGADAAN LAMPU HIGHMAST	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).CASH BOX	188
METERISASI LPJU	186
PENGGANTIAN BOX kWh Meter	2
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).CASSETTE RECORDER	1
BARCODE SCANNER	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.AMPLIFIER	7
Marcopolo	4
MRZ . DAJ 150	1
TOA	2
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.BANGKU TUNGGU	16
BANGKU TUNGGU	16
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.BRANDKAS	5
BAND KAS	5
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.CAMERA FILM	11
CCTV	11
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.CCTV - CAMERA CONTROL TELEVISION SYSTEM	9
CAMERA 2MP CCTV	1
CCTV HIK Vision DS-2CD1021	7
HIKVISION CAMERA CCTV PTZ	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.DVR CCTV	1
HIKVISION DS-7616NI-Q1 NVR, HARDISK	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.EXHAUSE	11

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
FAN	
FAN / PANASONIC	11
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILING CABINET BESI	16
BROTHER	16
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.HANDY CAM	1
GENERATOR GASOLINE	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KARDEX KAYU	3
KARDEK KAYU	3
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN	1
KIPAS DINDING BLOWER	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT .KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT ESELON III	1
BROTHER BR 610 A	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT ESELON II	10
KURSI HADAP	10
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KAYU	75
KURSI KAYU	75
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KERJA PEJABAT .KURSI KERJA	1
KURSI KERJA	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KERJA PEJABAT ESELON II	2
KURSI ESELON II	2
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KERJA PEJABAT ESELON IV	10
100 X 60 CM	1
GL 1200	4
KURSI ESELON IV	5
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI LIPAT	110
CHITOSE	80
FUTURA	30
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR	4
KURSI PUTAR	4
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI RAPAT	10
CHITOSE	10
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI TAMU	1
SIZE	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LAIN-LAIN	1753
Audio Bank AB 1100	1
CPU	1
CYCLONE TURBIN VENTILATOR	11
CYCLONE VENTILATOR	11
Komputer IBM	1
Lampu Penerangan	16
LAMPU ROTARY	1
LPJU	25
LPJU GATOT SUBROTO	1
LPJU MUNGKIT-TANJUNG	1

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
LPJU Octa Gonal	80
LPJU PAKELAN-MERTOYUDAN	1
LPJU SARWO EDI	1
LPJU Sederhana	260
NVRSTAND ALON TYPE DS-7616-K2	1
Panasonic	1
PEMASANGAN LPJU OMAMEN 3m	23
PEMASANGAN LPJU OMAMEN 3m 450 VA	16
PEMASANGAN LPJU OMAMEN 3m 450 VA-	3
PEMASANGAN LPJU OMAMEN 6m	4
PEMASANGAN LPJU OMAMEN 6m 450 VA	2
PEMASANGAN LPJU ORNAMEN 3m	10
PEMASANGAN LPJU ORNAMEN 3m -	10
PEMASANGAN LPJU ORNAMEN 3m 1.300 watt	2
PEMASANGAN LPJU ORNAMEN 3m 2.200 watt	1
PEMASANGAN LPJU ORNAMEN 3m 450 watt	2
PEMASANGAN LPJU ORNAMEN 3m 450 watt-	1
PEMASANGAN LPJU ORNAMEN 3m 900 watt	4
PEMASANGAN LPJU ORNAMEN 6m	3
-PEMASANGAN LPJU ORNAMEN 6m	1
PEMASANGAN LPJU ORNAMEN 6m 900 watt	1
PEMASANGAN LPJU ORNAMEN 6m 900 watt	1
PEMASANGAN TIANG LPJU OKTAGONAL 900 watt	5
PEMASANGAN TIANG LPJU OKTAGONAL 900 watt	1
PEMASANGAN TIANG LPJU OKTAGONAL NON Kwh	33
PENGADAAN TIANG LPJU	1
Rambu LL	1179
STHIL	1
TANPA MEREK	2
TP.LINK	1
TRALIS	32
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LAMPU	1602
FLASH	2
KWH METER	62
KWH METER	1
KWH METER WILAYAH BANDONGAN	1
KWH METER WILAYAH BOROBUDUR	6
KWH METER WILAYAH CANDIMULYO	8
KWH METER WILAYAH CANDIMULYO III	1
KWH METER WILAYAH GRABAG	5
KWH METER WILAYAH KALIANGKRIK	5
KWH METER WILAYAH MERTOYUDAN	2
KWH METER WILAYAH MUNGKID	2
KWH METER WILAYAH MUNTILAN	7
KWH METER WILAYAH PAKIS	16
KWH METER WILAYAH PAKIS II	8
KWH METER WILAYAH SALAM	5
KWH METER WILAYAH SALAMAN	17
KWH METER WILAYAH SAWANGAN	2
KWH METER WILAYAH SECANG	14
KWH METER WILAYAH SRUMBUNG	6
KWH METER WILAYAH TEGALREJO	4
KWH METER WILAYAH TEMPURAN	3

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
LPJU	723
LPJU DENGAN TIANG 6 M	28
LPJU Sederhana	171
LPJU SEDERHANA	3
LPJU WILAYAH BANDONGAN	4
LPJU WILAYAH BOROBUDUR	28
LPJU WILAYAH CANDIMULYO	38
LPJU WILAYAH CANDIMULYO III	4
LPJU WILAYAH GRABAG	22
LPJU WILAYAH KALIANGKRIK	20
LPJU WILAYAH MERTOYUDAN	6
LPJU WILAYAH MUNGKID	8
LPJU WILAYAH MUNTILAN	45
LPJU WILAYAH PAKIS	69
LPJU WILAYAH PAKIS II	36
LPJU WILAYAH SALAM	24
LPJU WILAYAH SALAMAN	60
LPJU WILAYAH SAWANGAN	8
LPJU WILAYAH SECANG	54
LPJU WILAYAH SRUMBUNG	20
LPJU WILAYAH TEGALREJO	32
LPJU WILAYAH TEMPURAN	4
TANPA MERK	18
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI BESI/METAL	4
ALMARI BESI	1
Bostinco	2
BROTHER	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI BUKU UNTUK PEJABAT ESELON II	1
LEMARI BUKU PEJABAT ESELON II	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI DAN ARSIP PEJABAT .LEMARI ARSIP UNTUK ARSIP DINAMIS	1
BROTHER B-304	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI ES	1
SHARP-SJ 420 GD	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI KACA	4
LEMARI SOROK	4
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI SOROK	3
LEMARI SOROK	3
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LOUDSPEAKER	9
JBL 10	2
TOA	7
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA 1/2 BIRO	66
MEJA ½ BIRO	60
MEJA 1/2 BIRO	1
MEJA KERJA	4
MODERA E CLASS EOD 1260	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	6

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
MEJA 1/2 BIRO	6
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEJABAT ESELON II	7
MEJA BIRO	6
MEJA ESELON II	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KOMPUTER	6
BROTHER	6
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA PODIUM	1
MEJA PODIUM	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RAPAT	7
MEJA RAPAT	6
Meja Rapat (satu set)	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA TAMU BIASA	1
MEJA KURSI TAMU	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN ANTRIAN	1
MESIN ANTRIAN PKB (1 SET)	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN KETIK MANUAL LANGEWAGON (18-27 INCI)	9
Olivetti	1
Olympia	8
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN PEMOTONG RUMPUT	1
PRO TANAKA	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .DAUN PINTU ALUMUNIU	1
BESI ALUMUNIU & KACA	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .LEMARI KAYU	17
ALMARI KERJA	1
ALMARI LACI PANIL	4
LEMARI KAYU	12
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .RAK KAYU	2
RAK AAUDIO	1
RAK KABINET TV	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .TENDA	2
TANPA MEREK	1
TENDA	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.PAPAN NAMA INSTANSI	24
White Board	2
PAPAN NAMA KANTOR	4
PAPAN NAMA TARIP	18
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.PAPAN PENGUMUMAN	24
PAPAN	8
PAPAN NAMA TARIP	4
PAPAN PENGUMUMAN	4
PAPAN TARIP PARKIR	8
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.RADIO	1

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
POLYTRON	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.RAK BESI	32
HAND MADE	5
RAK BESI	17
RAK SIKU BAJA	10
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.RAK KAYU	7
RAK KAYU	7
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ROAD BARRIER/PEMBATAS JALAN	49
WATER BARIER	49
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.SICE	4
Kursi Tamu (SIZE)	3
ZICE	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.SOUND SYSTEM	1
Aubern Powered Powered Portable Speaker BE-15CXR	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.STABILISATOR	8
ICA CP 1400	2
POWERTREE	5
UPS /PROLINK	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.TAMPUNGAN	464
LPJU	449
TANPA MEREK	15
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.TANGGA ALUMINIUM	2
TANGGA ALUMUNIUM CUSTOM	1
Tangga Alumunium. Uk p 3.5 m	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.TELEVISI	7
Panasonic	1
PANASONIC LED	1
SHARP	1
TOA ZW	1
TV / LG - LED	1
TV / LG - LED	1
TV / SONY LED	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.TEMPAT TIDUR BESI	1
SOFA BED	1
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.WASTAFEL (TEMPAT CUCI TANGAN)	14
AMERICAN STANDAR	8
AMERICAN STANDARD	6
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.WIRELESS	2
LG	1
WIRELESS/ SIMBADA	1
ALAT KOMPUTER.ACCEP POINT	1
TP LINK	1
ALAT KOMPUTER.CARD READER (PERALATAN MAINFRAME)	3
SMART CARD READER	2
TANPA MEREK	1
ALAT KOMPUTER.CARD READER (PERALATAN MINI KOMPUTER)	4

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
SAM Reader & Writer OMNIKEY 5422	2
UHF RFID Reader & Writer SLR5318	2
ALAT KOMPUTER.CPU (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	4
Acer Aspire	3
LG	1
ALAT KOMPUTER.EXTERNAL/ PORTABLE HARDISK	2
BARACUDA	2
ALAT KOMPUTER.HUB	2
HUB HIK VISION	1
SWITCH HUB POE 4 PORT	1
ALAT KOMPUTER.INTERNET	1
SPIDY	1
ALAT KOMPUTER.LAIN-LAIN	5
SAMSUNG GALAXY TAB A 6	1
TABLET UJI	4
ALAT KOMPUTER.LAPTOP	7
Gear Book K3 (16M5)	3
HP PAVILLION 14-EC0013AU (ADP)	1
MSI THIN 15 B12UCK	3
ALAT KOMPUTER.LOCAL AREA NETWORK (LAN)	1
LOCAL AREA NETWORK (LAN)	1
ALAT KOMPUTER.MODEM	3
Modem /METRIK	1
MODEM SMS GATEWAY	1
TP.LINK	1
ALAT KOMPUTER.MONITOR	3
LENOVO D24-40 FHD	1
LG	1
MONITOR	1
ALAT KOMPUTER.NETWARE INTERFACE EXTERNAL	20
HUB 16 PORT,WIFI AKSES POINT	2
WIFI	18
ALAT KOMPUTER.NOTE BOOK	19
LENOVO L340	2
A SUS	2
Acer Aspire	1
Asus	5
DELL	2
HP	2
HP-240G5 WIN	1
NOTE BOOK / ASUS	2
SONY VAIO	2
ALAT KOMPUTER.PC UNIT	30
Asus	3
ASUS AIO ALL IN ONE	1
ASUS S300TA	2
AXIO PRO L5	1
CPU / ASUS	1
Gear GS-i5104008H1WPM24	4
GS-I5104008hiwpm	1
HDD/Philips	2

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
HP	2
Intel Pentium P	1
KOMPUTER PC DESKTOP + LED	3
LENOVO	1
PC ASUS-BROADCAST	1
PC BRANDED ASUS	1
PC DESKTOP RAKITAN	1
PC RAKIT	1
TANPA MEREK	4
ALAT KOMPUTER.PERALATAN MINI KOMPUTER .PERSONAL COMPUTER/PC	9
COMPUTER DELL-3650	1
COMPUTER/PC	1
DELL-3650	3
HP	1
KOMPUTER SERVER i7 XEON	1
LENOVO	2
ALAT KOMPUTER.PERALATAN MINI KOMPUTER .PRINTER	16
CANON	1
EPSON	2
EPSON L1210	1
EPSON L3210	1
EPSON MULTI	1
HP LASERJET	1
HP SMART TANK 615	1
INK JET CANON PIXMA	1
PRINTER	3
PRINTER BROTHER	1
PRINTER EPSON INJKET L 310	1
PRINTER EPSON INJKET L 360	1
PRINTER SMARTCARD	1
ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	36
BROTHER	1
BROTHER MFC T4500DW	1
BROTHER-J3720	1
CANON	1
CANON IP 2770	1
CANON PIXMA G1010	2
Canon Pixma IP 2770	1
EPSON	2
Epson L 110	1
EPSON L1110	2
EPSON L3150	2
EPSON L3210	2
EPSON L3250	5
EPSON L360	3
EPSON-L360	2
HP SMART TANK 615	1
Laserjet 1102	1
PRINTER BROTHER	2
PRINTER EPSON	2

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
Printer Laserjet	1
PRINTER SMARTCARD RFID	1
SMART CARD	1
ALAT KOMPUTER.ROUTER	18
MIKROTIK ROUTERBOARD HAP LITE	8
MIKROTIK/ INDOOR RB450G	3
ROUTER MIKTORIK RB 941-2ND	6
TANPA MEREK	1
ALAT KOMPUTER.SCANNER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	6
BOOK SCANNER CZUR ET18 PRO	2
TANPA MEREK	4
ALAT KOMPUTER.SERVER	4
DELL POWEREDGE T150 E-2324	1
NVR Stand Alone G-lenz Type-SUPPORT CLOUD	2
PC SERVER RAKITAN	1
ALAT KOMPUTER.STORAGE MODUL DISK (PERALATAN MINI KOMPUTER)	6
MODUL INTEGRATOR/INTERFANCE ALAT UJI	6
ALAT KOMPUTER.TABLET PC	2
SAMSUNG GALAXY TAB S9 FE 5G	2
ALAT KOMPUTER.TAMPUNGAN	1
PROYEKTOR VIEWSONIC	1
ALAT KOMPUTER.UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	11
APC BX1600MI-MS	3
ICA	2
ICA 602B	2
ICA -CS 1238	1
PROLINK PRO	1
PROLINK-PRO 1501 SFC	1
UPS	1
ALAT LABORATORIUM.ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN LISTRIK A.ALAT UJI GAS BUANG	2
NANHUA NHA 402EN	1
NANHUA NHT 6	1
ALAT LABORATORIUM.INFRARED THERMOMETER	9
YUWELL	9
ALAT PERTANIAN.LAIN-LAIN	1
TANAKA	1
ALAT PERTANIAN.PENYEMPROT OTOMATIS (AUTOMATIC SPRAYER)	12
INTAGRO	2
POLAR	10
ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE.MICROPHONE	2
DMA	1
Krezt	1
ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.ANTENE VHF/FM PORTABLE	2
ANTENA MOBIL VHF 140-174 MHZ	2

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.ANTENE VHF/FM STATIONARY	3
TELEX GAZDEN TIPE T 2M	3
ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.CAMERA CONFERENCE	1
LOGITECH	1
ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.CAMERA FILM	1
SONY	1
ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.CAMERA WALL BOX	55
HIKVISION	10
HIKVISION Bullet	6
HIKVISION NETWORK CAMERA/ DS-2CD2T21G0-I	35
TANPA MEREK	4
ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.HANDY TALKY (HT)	35
HT ALINCO DJ CRX7	5
HT ICOM IC-V80	15
ICom V80	15
ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.INTERCOM UNIT	3
RIG ICOM IC-2300H	3
ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.LAIN-LAIN	14
Phonik	1
Asatron	1
Jushy	1
Krets Pro	2
SS7	1
Superior	2
Targa PL	2
TOA	1
ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.LAYAR FILM/PROJECTOR	1
GALAXY	1
ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.MAST TOWER	1
TOWER TRIANGLE	1
ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.PAGER	2
ALINCO	1
Alinco DR135	1
ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.PERALATAN STUDIO VISUAL .CAMERA + ATTACHMENT	2
CANON	1
NIKON COOLPIX	1
ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.PERALATAN STUDIO VISUAL .PROYEKTOR + ATTACHMENT	1
EPSON	1
ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.PESAWAT TELEPHONE	7
Alinco DJ196	5
Panasonic	2

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.POWER SUPPLY MICROPHONE	2
DAKAI ALC-3030A	1
JK Coustic JU - 2002	1
ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.REPEATER RX/TX	1
MOTOROLA CDR 500	1
ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.TELEPHONE (PABX)	10
PANASONIC/KX-HDV130X	5
PANASONIC/KX-HDX-100BX	5
ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.VIDEO PRESENTER	1
Running Text RGB	1
RAMBU RAMBU.GUARDRAIL	12
GUADRAIL	7
GUADRAIL W BEAM TIPE B	1
GUADRAIL W BEAM	1
W BEAM	3
RAMBU RAMBU.RAMBU CERMIN	58
911 Cermin Tikungan Lingkaran Penuh	14
CERMIN TIKUNG	10
CERMIN TIKUNGAN	2
MERK 911	1
RAMBU CERMIN	31
RAMBU RAMBU.RAMBU JALAN	1597
ASTM TYPE IV	62
MARKA PITA PENGGADUH (PITA KEJUT)	1
RAMBU CERMIN	2
RAMBU JALAN	1493
RAMBU JALAN DELINIATOR PIPA BESI	20
RAMBU LALU LINTAS JALAN	6
TANPA MERK	13
RAMBU RAMBU.RAMBU PAPAN TAMBAHAN	20
RAMBU PAPAN TAMBAHAN	20
RAMBU RAMBU.RAMBU-RAMBU LARANGAN	34
BARIKADE	24
RAMBU BARIKADE	10
RAMBU RAMBU.RAMBU-RAMBU PERINGATAN	308
RAMBU JALAN	27
RAMBU TANAM	30
RUMBLE STRIP	5
TRAFFIC CONE 75 CM	66
TRAFIC CONE	180
RAMBU RAMBU.RAMBU-RAMBU PETUNJUK/PENUNTUN	212
ASTM TYPE IV	12
COUNTDOWN TIMER	1
RAMBU EVAKUASI	82
RAMBU LALU LINTAS	88
RAMBU PENUNJUK JALAN	18
RAMBU RPJJ DAUN RAMBU TUNGGAL	2
TIANG TUNGGAL	9
RAMBU RAMBU.SEQUENCE FLASHING LIGHT	4

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
FLASHING	3
LAMPU FLASHING	1
RAMBU RAMBU.TRAFFIC LIGHT	4
TRAFIC LIGHT	4

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang bulan Desember 2024

c. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabelnya yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang berkaitan dengan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang meliputi :

- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator-indikator kinerja ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum.

Untuk mengetahui kinerja dinas, Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang melakukan penilaian kinerja pada tahun tahun sebelumnya. Penilaian kinerja ini dimulai dengan penentuan indikator-indikator kinerja dan variabelnya, sebagaimana tabel pencapaian kinerja dibawah ini :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan	persen	75,62	75,62				53,89	54,02				71,26	71,44			
2	Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan	persen			59,35	62,34	90,00			61,38	72,68	98,03			103,42	116,58	108,92

Tabel 2.7
 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan
 Tahun 2020 – 2024

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.708.80 8.067	6.144.26 3.100	6.307.70 9.738	5.251.16 2.000	6.886.99 6.143	4.877.96 0.064	5.578.49 2.719	6.074.76 1.364	5.111.79 9.193	6.739.26 8.882	85,45	90,79	96,31	97,35	97,85	6,17	3,1
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	24.174.3 69.535	23.648.0 74.920	28.929.5 38.208	30.823.9 92.571	28.429.7 50.913	23.482.9 77.342	23.355.4 53.386	28.709.3 86.851	30.562.2 98.136	28.334.2 67.778	97,14	98,76	99,24	99,48	99,66	3,68	0,63
Jumlah	29.883.1 77.602	29.792.3 38.020	35.237.2 47.946	36.075.1 54.571	35.316.7 47.056	28.360.9 37.406	28.933.9 46.105	34.784.1 48.215	35.774.0 97.329	35.073.5 36.560	94,91	97,12	98,71	99,17	99,31	4,56	1,1

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan

a. Permasalahan

Sebagai Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) pelaksana kegiatan teknis berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, Dinas Perhubungan memiliki beberapa kendala permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 2.8
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya layanan perhubungan yang berkeselamatan	Belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Belum optimalnya ketersediaan dokumen rencana induk LLAJ Kabupaten
			Belum Optimalnya Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
			Belum Optimalnya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Belum Optimalnya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Belum Optimalnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
			Belum Optimalnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
			Masih rendahnya disiplin penyelenggaraan parkir
			Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
			Belum Optimalnya pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas
			Belum Optimalnya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
			Belum Optimalnya pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Belum Optimalnya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Belum optimalnya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum Optimalnya Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
			Belum Optimalnya Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
			Belum optimalnya Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor
			Belum Optimalnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Belum Optimalnya Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
			Belum Optimalnya Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Belum Optimalnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Belum optimalnya pengelolaan terminal penumpang Tipe C
			Belum Optimalnya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
			Belum Optimalnya Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C
			Belum Optimalnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
			Belum optimalnya penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota
			Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
			Belum optimalnya sarana angkutan umum
			Belum optimalnya penyelenggaraan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
			Belum Optimalnya Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Belum optimalnya penyelenggaraan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Belum Optimalnya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

b. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang dari Dinas Perhubungan dimasa mendatang, dimana isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Dengan kata lain, isu strategis ini merupakan suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi menjadi masalah pada suatu saat, serta dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola oleh Dinas Perhubungan dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Perhubungan dengan memperhatikan gambaran pelayanan Dinas Perhubungan, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Dinas Perhubungan, implikasi RTRW dan KLHS Dinas Perhubungan maka isu strategis sebagai berikut :

Tabel 2.9
Simpulan Isu Strategis Dinas Perhubungan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1 Penanganan Urusan Perhubungan	2 Belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	3 Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial	4 SDG's yang berlaku hingga 2030	5 Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan pangan	6 Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan	Belum optimalnya kinerja infrastruktur perhubungan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode Tahun 2025-2029 adalah:

“Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera“ atau Magelang Anyar Gress.

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut di atas mengandung lima kata kunci yaitu Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera yang disingkat “Anyar Gress”. Adapun makna dari kelima kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut :

Aman adalah kondisi ideal dalam pembangunan daerah untuk menuju masyarakat adil makmur. Kondisi aman dalam hal ini menunjuk pada stabilitas politik dan keamanan yang menjadi prasyarat berkembangnya Kabupaten Magelang untuk meningkatkan daya saing daerah. Stabilitas politik tercermin dalam mekanisme check and balance antara legislatif dan eksekutif, sedangkan stabilitas keamanan didukung oleh mekanisme perumusan regulasi dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Nyaman mengandung makna ketenteraman dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Magelang dalam kehidupan sehari-hari dan menjalankan aktivitas. Nyaman juga mempunyai arti berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mencapai Magelang Nyaman maka dalam lima tahun kedepan kami bertekad mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta responsif terhadap bencana.

Religius menjadi salah satu fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan manusia di Kabupaten Magelang. Sebagaimana termaktub dalam dasar negara yaitu Pancasila sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa menjadi acuan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Unggul mempunyai makna multidimensi yaitu tujuan untuk menjadi masyarakat yang berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing. Pasangan calon Grengseng-Sahid berkeinginan agar masyarakat Kabupaten Magelang menjadi Sumber Daya Manusia yang unggul. Maka dari itu, pendidikan harus berkualitas dan merata untuk semua lapisan masyarakat. Pemantapan nilai-nilai karakter bangsa dalam dunia pendidikan menjadi sangat krusial untuk menjaga keadaban dan mewujudkan masyarakat yang berbudaya.

Selain itu untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul diperlukan masyarakat yang sehat. Kesehatan publik menjadi pilar penting dalam membangun Kabupaten Magelang. Kesehatan publik dalam konteks ini dapat dilihat dari dua konteks yaitu perspektif preventif dan kuratif. Dalam lima tahun ke depan Bupati dan Wakil Bupati bertekad untuk mewujudkan layanan kesehatan preventif dan kuratif yang merata untuk semua. Muara dari dimensi-dimensi tersebut adalah terwujudnya daya saing daerah yang tinggi. Makna unggul tidak hanya untuk masyarakatnya, namun juga penyelenggara pemerintahannya. Birokrasi yang unggul ditandai dengan birokrasi yang kompeten, melayani, dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejahtera dalam hal ini adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan meningkatnya kemakmuran setiap warga Kabupaten Magelang. Kondisi ini mengacu pada semakin turunnya angka kemiskinan, peningkatan pendapatan perkapita, pemerataan pendapatan masyarakat yang ditandai dengan indeks gini yang semakin rendah, menurunnya tingkat pengangguran, dan tumbuhnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian, dan UMKM. Kesejahteraan masyarakat harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Magelang. Prinsip keadilan dan pemerataan harus diberlakukan untuk semua bidang pemangunan dan semua wilayah di Kabupaten Magelang.

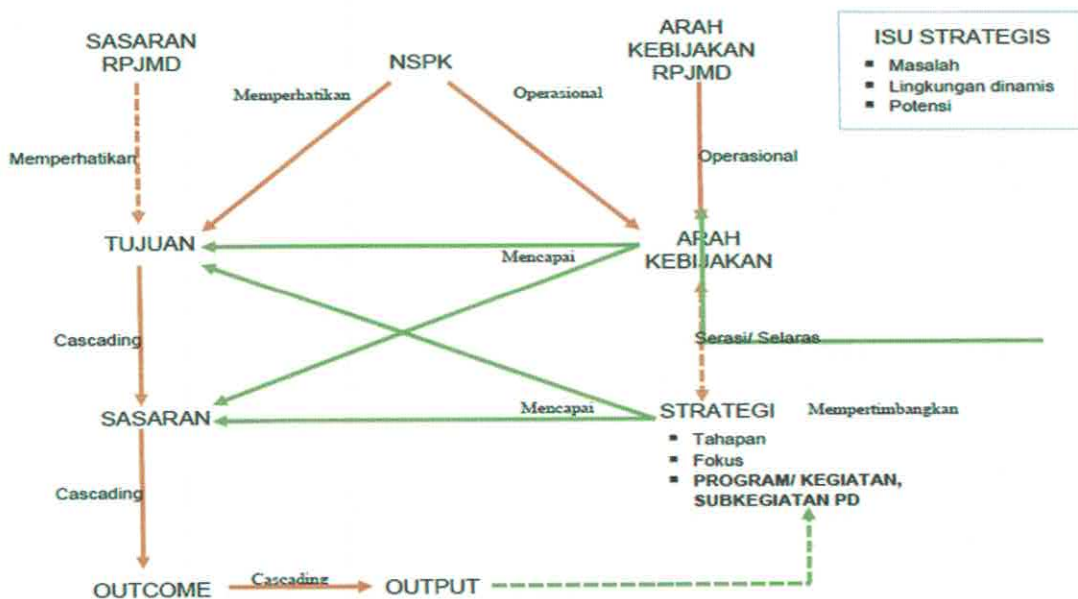
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, maka misi pembangunan Kabupaten Magelang dijabarkan dalam 5 misi utama (Panca Dharma) sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.
5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana.

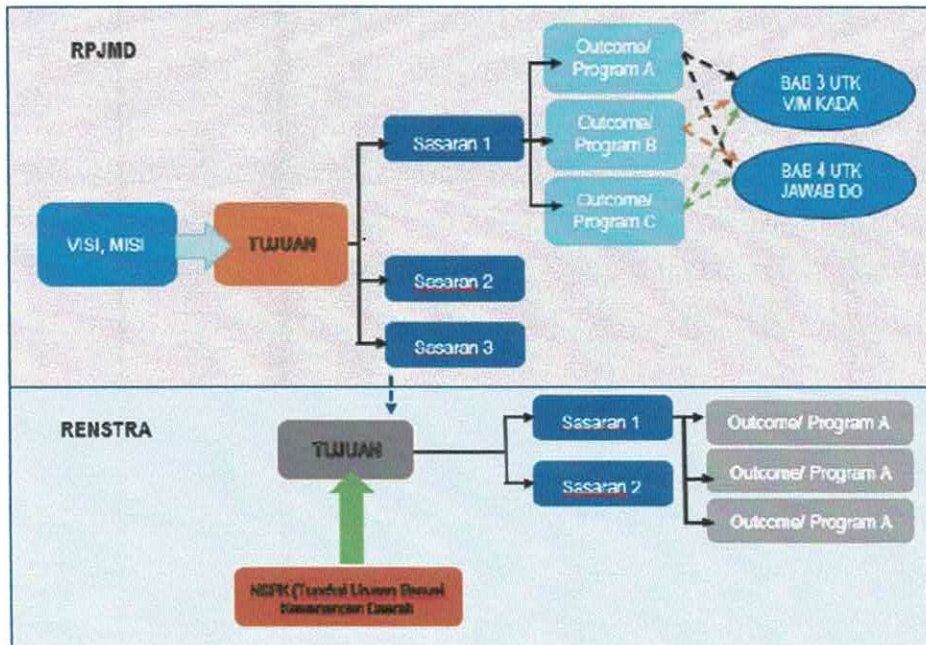
3.1 Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025- 2029

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penentuan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah. Tujuan dan Sasaran memuat indikator-indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja tujuan memuat target-target yang harus dicapai pada periode akhir Renstra Perangkat Daerah, sedangkan indikator kinerja sasaran memuat target-target kinerja selama lima tahun yang hendak dicapai oleh Perangkat Daerah. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Meningkatnya kinerja infrastruktur perhubungan adalah tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, konsep Renstra Perangkat Daerah digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1
Konsep Renstra Dinas Perhubungan



Gambar 3.2
 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
 Dinas Perhubungan



3.2 Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian outcome program Dinas Perhubungan. Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang adalah Meningkatnya pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkeselamatan.

Dibawah ini akan dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang beserta dengan indikator kinerjanya. Rumusan tujuan dan sasaran Perangkat beserta indikatornya disajikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur dasar (Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 8 Tahun 2025)	T : Meningkatkan kinerja infrastruktur perhubungan		T : Indeks kinerja infrastruktur perhubungan yang berkeselamatan	46,96	50,75	56,27	61,72	67,20	70,13	
		S : Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkeselamatan	S1 : Indeks pembangunan infrastruktur perhubungan	50,49	52,45	54,41	56,38	58,43	60,39	
			S2 : Indeks layanan infrastruktur perhubungan	41,65	48,20	59,06	69,74	80,34	84,74	

3.3 Strategi Dinas Perhubungan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Dinas Perhubungan adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program, kegiatan, subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan.

Strategi Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029 adalah “Meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan”. Dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas layanan transportasi darat dengan mengedepankan keselamatan transportasi, penyediaan perlengkapan jalan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kendaraan yang berkeselamatan serta pemenuhan sarana prasarana yang memadai.

Renstra Dinas Perhubungan dijabarkan dalam tahapan yang sesuai dengan tahapan RPJMD. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan. Penahapan Renstra Dinas Perhubungan disajikan seperti pada tabel di 3.4 bawah ini.

Tabel 3.4

Penahapan Renstra Dinas Perhubungan

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
1	2	3	4	5
Penguatan Pondasi kinerja infrastruktur perhubungan guna mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah	Konsolidasi Pondasi kinerja infrastruktur perhubungan guna mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah	Akselerasi kinerja infrastruktur perhubungan guna mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah	Pemantapan kinerja infrastruktur perhubungan guna mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah	Mewujudkan kinerja infrastruktur perhubungan guna mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah

3.4 Arah Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan.

Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5
Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<ul style="list-style-type: none"> ● Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ● Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ● Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 	<p>Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas dan ketersediaan infrastruktur perlengkapan jalan pendukung keselamatan berlalu lintas</p> <p>Meningkatkan kelaikan kendaraan untuk mengurangi kecelakaan</p> <p>Meningkatkan sistem layanan transportasi publik yang berkualitas, efisien, dan terjangkau</p>	<p>Meningkatkan kualitas perencanaan bidang LLAJ</p> <p>Meningkatkan penyediaan/pemasangan perlengkapan jalan di jalan kabupaten</p> <p>Meningkatkan disiplin penyelenggaraan parkir</p> <p>Meningkatkan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas</p> <p>Meningkatkan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan</p> <p>Meningkatkan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor</p> <p>Meningkatkan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</p>	

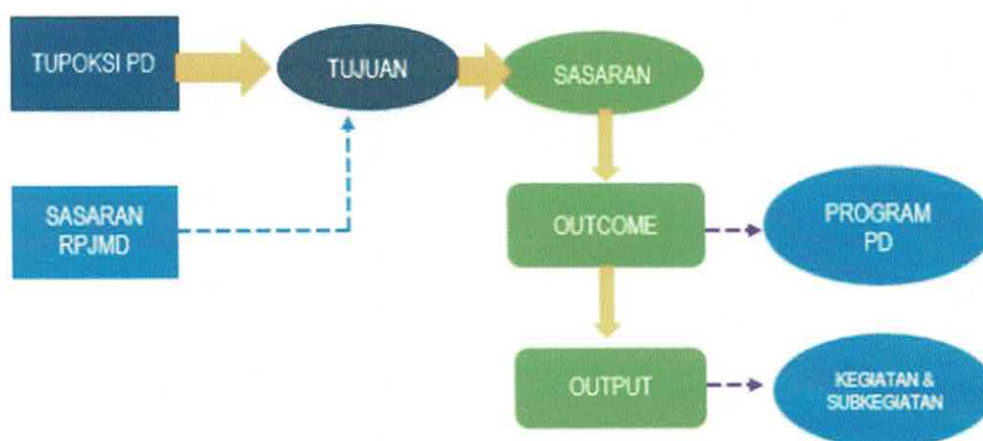
NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
			Meningkatkan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	
			Meningkatkan layanan angkutan umum	
			Menyusun dokumen perencanaan angkutan	
			Meningkatkan penyelenggaraan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan PD akan dapat ditetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kerangka perumusan program/kegiatan/subkegiatan Renstra Dinas Perhubungan dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini :

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Dinas Perhubungan



4.2 Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta Pemuatakhirannya

Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perhubungan dalam penyusunannya mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemuatakhirannya. Penjelasan rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan secara tabelaris disajikan dalam tabel 4.2. sebagaimana dibawah ini:

Tabel 4.2
Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1 Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur berkelanjutan dan berkeselamatan	2 T : Meningkatkan kinerja infrastruktur perhubungan	3 S : Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkeselamatan	4 S : Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkeselamatan	5 T : Indeks kinerja infrastruktur perhubungan yang berkeselamatan	6 S1 : Indeks pembangunan infrastruktur perhubungan S2 : Indeks layanan infrastruktur perhubungan IP1 : Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota	7 P : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			OC : Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat		IP2 : Kinerja lalu lintas kabupaten (V/C Rasio kabupaten) IP3 : Persentase pelayanan uji kendaraan berdasarkan jumlah kbwu	
					IP4 : Persentase ketersediaan fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang jalan tipe C IP5 : Persentase konektivitas jaringan transportasi darat	

					IP6 : Persentase fasilitasi penyelenggaraan angkutan pelajar aman	
		OP.K1 : Meningkatkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	OP.K1 : Meningkatkan Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	I.K1 : Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang ditetapkan	K1 : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
		OP.SK1 : Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	OP.SK1 : Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	I.SK1 : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	SK1.1 : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
		OP.K2 : Meningkatkan Kelengkapan jalan yang terpasang	OP.K2 : Meningkatkan Kelengkapan jalan yang terpasang	I.K2 : Jumlah kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota *	K2 : Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
		OP.SK2.1 : Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	OP.SK2.1 : Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	I.SK2.1 : Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	SK2.1 : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
		OP.SK2.2 : Tersedianya Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	OP.SK2.2 : Tersedianya Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	I.SK2.2 : Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	SK2.2 : Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
		OP.SK2.3 : Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	OP.SK2.3 : Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	I.SK2.3 : Jumlah Prasarana Jalan yang Terhabetasi dan Terpelihara	SK2.3 : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
		OP.SK2.4 : Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	OP.SK2.4 : Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	I.SK2.4 : Jumlah Perengkapan Jalan yang Terhabetasi dan Terpelihara	SK2.4 : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	
		OP.K3 : Meningkatkan kualitas layanan parkir	OP.K3 : Meningkatkan kualitas layanan parkir	IK3 : Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	K3 : Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	

			OP.SK3.1 : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	I.SK3.1 : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	SK3.1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
			OP.K4 : Meningkatkan kualitas Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	IK4 : Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	K4 : Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			OP.SK4.1 : Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	I.SK4.1 : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	SK4.1 : Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
			OP.SK4.2 : Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	I.SK4.2 : Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	SK4.2 : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			OP.SK4.3 : Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	I.SK4.3 : Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	SK4.3 : Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			OP.K5 : Meningkatkan kualitas audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	IK5 : Jumlah laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	K5 : Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
			OP.SK5.1 : Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	I.SK5.1 : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	SK5.1 : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
			OP.SK5.2 : Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	I.SK5.2 : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	SK5.2 : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

			OP.SK5.2 : Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	I.SK5.3 : Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	SK5.3 : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
			OP.K6 : Meningkatkan kendaraan bermotor yang laik jalan	IK6 : Jumlah kendaraan yang diuji	K6 : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			OP.SK6.1 : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	I.SK6.1 : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	SK6.1 : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			OP.SK6.2 : Tersedianya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	I.SK6.2 : Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	SK6.2 : Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
			OP.SK6.3 : Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	I.SK6.3 : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	SK6.3 : Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			OP.SK6.4 : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	I.SK6.4 : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	SK6.4 : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			OP.K7 : Meningkatkan kualitas terminal penumpang tipe C	IK7.1 : Jumlah terminal dalam kondisi baik	K7 : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
			OP.SK7.1 : Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	I.SK7.1 : Jumlah Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Tipe C	SK7.1 : Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Tipe C
			OP.SK7.2 : Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	I.SK7.2 : Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	SK7.2 : Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
			OP.SK7.3 : Terlaksana Penuhannya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C	I.SK7.3 : Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	SK7.3 : Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C
			OP.SK7.4 : Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	I.SK7.4 : Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terhabilitasi dan terpelihara	SK7.4 : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)

				<p>OP.K8 : Meningkatkan layanan analisis dampak lalu lintas (Andalain) untuk jalan Kabupaten/Kota</p> <p>OP.SK8.1 : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalain</p> <p>OP.K9 : Meningkatkan kualitas layanan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>OP.SK9.1 : Terkendalinya dan Terawasanya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</p> <p>OP.SK9.2 : Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>OP.K10 : Meningkatkan kualitas perencanaan angkutan umum</p> <p>OP.SK10.1 : Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>OP.K11 : Meningkatkan kualitas layanan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>IK8 : Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalain) untuk Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>I.SK8.1 : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalain</p> <p>IK9 : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</p> <p>I.SK9.1 : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</p> <p>I.SK9.2 : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</p> <p>IK10 : Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>I.SK10.1 : Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>IK11 : Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota diterbitkan</p>	<p>K8 : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalain) untuk Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>SK8.1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalain</p> <p>K9 : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>SK 9.1 : Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</p> <p>SK 9.2 : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>K10 : Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>SK10.1 : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>K.11 : Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>
--	--	--	--	---	--	---

			<p>OP.SK11.1 : Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Terintegrasi</p>	<p>I.SK11.1 : Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Terintegrasi</p>	<p>SK11.1 : Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p>
--	--	--	---	--	---

4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perhubungan mengacu pada rencana program dalam RPJMD 2025-2030 Kabupaten Magelang yang menunjang secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dokumen Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun setiap lima tahun. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan merupakan pijakan penyusunan dokumen Renja (Rencana Kerja) yang dibuat per tahun selama kurun waktu lima tahun. Dokumen renja menjadi dasar penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perhubungan yang akan dilaksanakan dan dievaluasi kinerjanya untuk setiap tahun anggaran. Uraian rencana program, kegiatan, dan Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif/Pendanaan tertuang dalam tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
PERHUBUNGAN				33.678.124. 228	26.599.040. .130	29.937.33 3.811	35.459.61 3.794	38.178.12 4.228							
	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota	41,04	48,21	25.875.059. 379	50,17	19.795.975 .281	52,13	23.134.26 8.962	54,25	28.656.54 8.945	56,21	31.375.05 9.379			
	Kinerja lalu lintas kabupaten (V/C Rasio kabupaten)	0,15	0,14		0,14		0,13		0,13		0,125				
	Persentase pelayanan uji kendaraan berdasarkan jumlah KBWU	51,38	58,43		59,71		60,56		61,20		61,84				
	Persentase Ketersediaan fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang jalan tipe C	54,90	58,82		60,78		62,75		64,71		66,67				
	Persentase konektivitas jaringan transportasi darat	64,41	66,10		66,10		67,80		67,80		69,49				
	Persentase fasilitas penyelenggaraan angkutan pelajar aman	-	41,38		58,62		75,86		93,10		100,00				
	Meningkatnya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	-	100%	50.000.000											
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	1 Doku men	50.000.000											
	Penyediaan Perlungkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	42,34%	48,21 %	19.883.034. 379	50,17%	12.085.950 .281	52,13%	14.351.24 3.962	54,25%	19.309.72 3.945	56,21%	21.234.83 4.379			
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	19 unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8637 unit	500 Unit	750.000.000	500 Unit	750.000.000	500 Unit	750.000.000	500 Unit	750.000.000	500 Unit	750.000.000	500 Unit	750.000.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	-	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	5730 unit	6100 unit	11.235.950.281	6100 unit	11.235.950.281	6100 unit	13.501.243.962	6100 unit	18.459.723.945	6100 unit	20.384.834.379	6100 unit	20.384.834.379	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Meningkatnya kualitas terminal penumpang tipe C	100%	100%	1.932.000.000	100%	1.932.000.000	100%	1.932.000.000	100%	1.932.000.000	100%	1.857.000.000	100%	1.857.000.000	
Penyusunan rencana pembangunan terminal tipe C	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	-	1 dokumen	75.000.000	3 dokumen	75.000.000	3 dokumen	75.000.000	3 dokumen	75.000.000	3 dokumen	75.000.000	3 dokumen	75.000.000	
Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	-	1 unit	75.000.000	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.000.000.000	
Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C	46 unit	46 Unit	782.000.000	46 Unit	782.000.000	46 Unit	782.000.000	46 Unit	782.000.000	46 Unit	782.000.000	46 Unit	782.000.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	3 unit	6 Unit	100.000.000	6 Unit	75.000.000	6 Unit	75.000.000	6 Unit	75.000.000	6 Unit	75.000.000	6 Unit	75.000.000	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Meningkatnya kualitas layanan parkir	100%	100%	390.000.000	100%	390.000.000	100%	390.000.000	100%	390.000.000	100%	390.000.000	100%	390.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	390.000.000	12 Laporan	390.000.000	12 Laporan	390.000.000	12 Laporan	390.000.000	12 Laporan	390.000.000	12 Laporan	390.000.000	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kendaraan bermotor yang laik jalan	12046 unit	13700 unit	449.825.000	14000 unit	399.825.000	14200 unit	449.825.000	14350 unit	399.825.000	14500 unit	449.825.000	14500 unit	449.825.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terdapatnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12046 unit	13700 unit	280.000.000	14000 unit	280.000.000	14200 unit	280.000.000	14350 unit	280.000.000	14500 unit	280.000.000	14500 unit	280.000.000	
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3500 dokumen	2.000 dokumen	50.000.000	2.000 dokumen	50.000.000	2.000 dokumen	50.000.000	2.000 dokumen	50.000.000	2.000 dokumen	50.000.000	2.000 dokumen	50.000.000	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 unit	15 Unit	104.825.000	15 Unit	104.825.000	15 Unit	104.825.000	15 Unit	104.825.000	15 Unit	104.825.000	15 Unit	104.825.000	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0,15	0,14	965.000.000	0,14	960.000.000	0,13	960.000.000	0,13	960.000.000	0,125	960.000.000	0,125	960.000.000	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	50 Laporan	50 Laporan	925.000.000	50 Laporan	920.000.000	50 Laporan	920.000.000	50 Laporan	920.000.000	50 Laporan	920.000.000	50 Laporan	920.000.000	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	2 Laporan	19.000.000	2 Laporan	19.000.000	2 Laporan	19.000.000	2 Laporan	19.000.000	2 Laporan	19.000.000	2 Laporan	19.000.000	
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	21.000.000	1 Laporan	21.000.000	1 Laporan	21.000.000	1 Laporan	21.000.000	1 Laporan	21.000.000	1 Laporan	21.000.000	
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya layanan analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Meningkatnya Kualitas audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	-	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	-	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	-	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas layanan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	12,38%	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.600.000.000	100%	2.400.000.000	100%	2.600.000.000	100%	2.600.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Terkendalinya dan Terawasnya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	20 laporan	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	12 unit	800.000.000	17 unit	800.000.000	22 unit	1.200.000.000	27 unit	2.000.000.000	29 unit	2.200.000.000	29 unit	2.200.000.000	
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas perencanaan angkutan umum	-	100%	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	1 Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas layanan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	
Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	1 Laporan	115.000.000	1 Laporan	115.000.000	1 Laporan	115.000.000	1 Laporan	115.000.000	1 Laporan	115.000.000	1 Laporan	115.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan Dinas Perhubungan	100%	100%	7.803.064.349	100%	6.803.064.849	100%	6.803.064.849	100%	6.803.064.849	100%	6.803.064.849	100%	6.803.064.849	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan	100%	100%	38.406.000	100%	38.406.000	100%	38.406.000	100%	38.406.000	100%	38.406.000	100%	38.406.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Perhubungan	3 Dokumen	6 Dokumen	4.500.000	6 Dokumen	4.500.000	6 Dokumen	4.500.000	6 Dokumen	4.500.000	6 Dokumen	4.500.000	6 Dokumen	4.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Dokumen	26 Dokumen	33.906.000	26 Dokumen	33.906.000	26 Dokumen	33.906.000	26 Dokumen	33.906.000	26 Dokumen	33.906.000	26 Dokumen	33.906.000	
Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan	100%	100%	5.473.388.849	100%	5.473.388.849	100%	5.473.388.849	100%	5.473.388.849	100%	5.473.388.849	100%	5.473.388.849	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang/bulan	45 orang/bulan	5.339.964.849	45 orang/bulan	5.339.964.849	45 orang/bulan	5.339.964.849	45 orang/bulan	5.339.964.849	45 orang/bulan	5.339.964.849	45 orang/bulan	5.339.964.849	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54 Dokumen	54 Dokumen	133.424.000	54 Dokumen	133.424.000	54 Dokumen	133.424.000	54 Dokumen	133.424.000	54 Dokumen	133.424.000	54 Dokumen		
Administrasi Kepegawain Dinas Perhubungan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawain Dinas Perhubungan	100%	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45 paket	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	
Administrasi Umum Dinas Perhubungan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Dinas Perhubungan	100%	100%	402.676.000	100%	402.676.000	100%	402.676.000	100%	402.676.000	100%	402.676.000	100%	402.676.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 laporan	75 Laporan	242.676.000	75 Laporan	242.676.000	75 Laporan	242.676.000	75 Laporan	242.676.000	75 Laporan	242.676.000	75 Laporan	242.676.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100%	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	278.267.000	100%	278.267.000	100%	278.267.000	100%	278.267.000	100%	278.267.000	100%	278.267.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	68.267.000	12 Laporan	68.267.000	12 Laporan	68.267.000	12 Laporan	68.267.000	12 Laporan	68.267.000	12 Laporan	68.267.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	60 Laporan	210.000.000	60 Laporan	210.000.000	60 Laporan	210.000.000	60 Laporan	210.000.000	60 Laporan	210.000.000	60 Laporan	210.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	550.327.000	100%	550.327.000	100%	550.327.000	100%	550.327.000	100%	550.327.000	100%	550.327.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit	34 Unit	324.990.000	34 Unit	324.990.000	34 Unit	324.990.000	34 Unit	324.990.000	34 Unit	324.990.000	34 Unit	324.990.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	5 Unit	4.000.000	5 Unit	4.000.000	5 Unit	4.000.000	5 Unit	4.000.000	5 Unit	4.000.000	5 Unit	4.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 unit	74 Unit	33.902.000	74 Unit	33.902.000	74 Unit	33.902.000	74 Unit	33.902.000	74 Unit	33.902.000	74 Unit	33.902.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 unit	2 Unit	187.435.000	2 Unit	187.435.000	2 Unit	187.435.000	2 Unit	187.435.000	2 Unit	187.435.000	2 Unit	187.435.000	

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Program prioritas disusun untuk mengarahkan dan memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirumuskan tidak hanya bersifat kualitatif/konseptual, namun dapat diimplementasikan secara nyata oleh Dinas Perhubungan penanggungjawab yang melekat pada program tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing Dinas Perhubungan terkait. Program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 mengacu pada tujuh Program Unggulan Kepala Daerah terpilih yang disebut dengan Sapta Cipta. Dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah, dari 7 (tujuh) Program Unggulan (Sapta Cipta), Dinas Perhubungan mendukung 2 (dua) Program Unggulan, yaitu sebagai berikut:

1. Sapta cipta ke-1 “Pinter Ngaji, Pinter Sekolah Bocah” (misi 1)

Dari 7 (tujuh) program yang ada pada Sapta cipta ke-1, Dishub melaksanakan 1 (satu) program, yaitu revitalisasi fasilitas pendidikan dan tenaga kependidikan umum dengan pemberian layanan angkutan gratis bagi anak sekolah.

2. Sapta cipta ke-3 “Makmur Rakyat” (misi 4)

Dari 6 (enam) program yang ada pada Sapta cipta ke-3, Dishub melaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Sabuk Gunung Magelang (konektivitas antar daerah menuju wilayah pusat pertumbuhan ekonomi), yaitu penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten dengan pembangunan LPJU, rambu, guardrail, marka jalan, dll.

Program Unggulan (Sapta Cipta) yang diampu oleh Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	Sapta cipta ke-1 “Pinter Ngaji, Pinter Sekolah Bocahe” Revitalisasi Fasilitas Pendidikan dan tenaga Kependidikan Umum			Mendukung misi 1 yaitu "Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)"
1.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dilaksanakan dengan pemberian layanan transportasi gratis bagi anak sekolah (SMP)
2	Sapta Cipta ke-3 “Makmur Rakyat” 1. Program Sabuk Gunung Magelang (konektivitas antar daerah menuju wilayah pusat pertumbuhan ekonomi) 2. Rekonstruksi jalan tambang			Mendukung misi 4 yaitu "Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah"
2.2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dilaksanakan dengan : 1. Penyusunan Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten berupa LPJU, Rambu, Guardrail, Marka, dll Penyediaan perlengkapan jalan pada jalur tambang

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran unit kerja PD yang bersangkutan, yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasikan. Dalam penerapannya wajib menggunakan prinsip

kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan meliputi indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perhubungan yang merupakan indikator tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja program yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Perhubungan selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Perhubungan.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan, sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2025 - 2029, sebagai upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Dishub menentukan indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029.

Untuk indikator kinerja utama Dinas Perhubungan dapat dilihat dalam tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks kinerja infrastruktur perhubungan yang berkeselamatan	36,17	46,96	50,75	56,27	61,72	67,20	70,13	70,13

1.1	Indeks pembangunan infrastruktur perhubungan	46,58	50,49	52,45	54,41	56,38	58,43	60,39	60,39
1.2	Indeks layanan infrastruktur perhubungan	20,55	41,65	48,20	59,06	69,74	80,34	84,74	84,74

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Dinas Perhubungan yaitu Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,64	0,64	0,66	0,66	0,68	0,68	0,69	0,69
2	Kinerja lalu lintas kabupaten (V/C Rasio kabupaten)	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,125	0,125

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029 merupakan perencanaan pembangunan bidang urusan perhubungan jangka menengah periode 5 (lima) tahunan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaannya dan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain :

1. Memprioritaskan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD;
2. Mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna sebesar-besarnya mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD;
3. Mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan tahun 2025 - 2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Dinas Perhubungan akan dijabarkan dalam Rencana

- Kerja (Renja) Dinas Perhubungan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Dinas Perhubungan wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Perhubungan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
 5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perhubungan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Sebagai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029 maka setiap tahun dilaksanakan evaluasi renja sehingga Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 benar-benar dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Perhubungan beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan secara berkesinambungan dan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Magelang, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Magelang



IMAM BASORI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701115 199003 1 003

LAMPIRAN



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/187/KEP/14/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2029

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi;
 - b. menyusun dokumen rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 sesuai dengan tahapan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Mei 2025
BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/187/KEP/15/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-
2029

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	IMAM BASORI, S. Sos., M.Si.	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua	Apabila terjadi mutasi pejabat/staf, maka pejabat/staf yang baru secara langsung menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud
2.	MASHADI, S.Sos.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Wakil Ketua	
3.	MUSLIKHATUN, S.H.	Kepala Subbagian Program pada Dinas Perhubungan	Sekretaris	
4.	SUHUD JOKO P., S.H., M.M.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan	Anggota	
5.	ARIF MUTOHAR, S.T., M.T.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
6.	SUHUD JOKO P., S.H., M.M.	Plt. Kepala Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan	Anggota	
7.	IKA SUSIYAWATI, S.E.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan	Anggota	
8.	THOMY TRI S., S.M.	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan	Anggota	

1	2	3	4	5
9.	MUCHTAROM, S.E.	Kepala Seksi Pengendalian Operasi pada Dinas Perhubungan	Anggota	
10.	RESTU SOFIA K., S.ST.	Kepala Seksi Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
11.	ZAENAL ASYKAR, S.Sos.	Kepala Seksi Pengelolaan Terminal pada Dinas Perhubungan	Anggota	
12.	SITI FATIMAH, S.E.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pengujian pada Dinas Perhubungan	Anggota	
13.	KADAR SUMANTRI, S.T.	Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan	Anggota	
14.	DWI ARYANTO, A.Md.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
15.	RATNA AGUS SUAJI, S.T.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
16.	RIA ANDY SPARINGGA, S.T.	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia pada Dinas Perhubungan	Anggota	
17.	DEWI AJI NUGRAHA, S.T.	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia pada Dinas Perhubungan	Anggota	
18.	WENI PRABATIWI MN., S.Ak.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
19.	MAYASARI, S.Ak.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
20.	FAJAR TRIYANTO, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Dinas Perhubungan	Anggota	

1	2	3	4	5
21.	DESSY ARIFFIYANTO L., A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Dinas Perhubungan	Anggota	

BUPATI MAGELANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196812281994031006

GRENGSENG PAMUJI

Sasaran Program (Outcome)	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah PD	Arah Kebijakan PD	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keluaran/Output	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota	Sesuai Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor 000.7/0002940 tahun 2024 : Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota = (Jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan / Jumlah total ruas jalan kewenangan kabupaten/kota)	Belum optimalnya pelaksanaan dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang LLAJ	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	Meningkatnya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ yang disusun pada tahun n	DISHUB
	2. Kinerja lalu lintas kabupaten (V/C Rasio kabupaten)	perbandingan volume dan kapasitas di jalan kabupaten	Belum optimalnya Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Peleaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ yang disusun pada tahun n	
			Belum optimalnya ketersediaan perlengkapan jalan	Meningkatkan penyediaan/pemasangan perlengkapan jalan di jalan kabupaten	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kelengkapan jalan yang terpasang	Jumlah Kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota *	Jumlah kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota *	
			Belum optimalnya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah halte yang dibangun pada tahun n	
			Belum optimalnya Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, penerangan jalan umum (PJU) dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)) yang dibangun pada tahun n	
			Belum optimalnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah halte yang dipelihara pada tahun n	
			Belum optimalnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, penerangan jalan umum (PJU) dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)) yang dipelihara pada tahun n	
			Masih rendahnya disiplin penyelenggaraan parkir	Meningkatkan disiplin penyelenggaraan parkir	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Meningkatnya kualitas layanan parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	

Sasaran Program (Outcome)	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah PD	Arah Kebijakan PD	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keluaran/Output	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
			Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan parkir pada tahun n	
			Belum Optimalnya pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas Manajemen dan Rekayasa Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Jalan Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Jalan Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Belum Optimalnya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasnya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pengamanan, posko laik jalan, pemilihan pelajar pelopor dan posko lebaran dan nataru pada tahun n	
			Belum Optimalnya pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan forum ilaj pada tahun n	
			Belum Optimalnya Penataan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Jalan Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Penataan Manajemen dan Rekayasa Jalan Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Jalan Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Jalan Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan penyusunan Kinerja lalu lintas kabupaten (V/C Rasio kabupaten) pada tahun n	
			Belum optimalnya audit dan inspeksi keselamatan LLAU di Jalan	Meningkatkan audit dan inspeksi keselamatan LLAU di Jalan	Audit dan inspeksi Keselamatan LLAU di Jalan	Meningkatnya kualitas audit dan inspeksi keselamatan LLAU di Jalan	Jumlah laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU di Jalan	Jumlah laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU di Jalan	
			Belum Optimalnya Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal pada tahun n	
					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota pada tahun n	
			Belum Optimalnya Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum pada tahun n	

Sasaran Program (Outcome)	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah PD	Arah Kebijakan PD	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keluaran/Output	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
3. Persentase pelayanan uji kendaraan berdasarkan jumlah kbbwu	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dibagi 2 dibagi jumlah KBBU aktif yang terdaftar (jml kbbu diuji/2) / jml kbbu aktif	Belum optimalnya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	Meningkatkan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kendaraan bermotor yang laik jalan	Jumlah kendaraan yang diuji	Jumlah sarana prasarana yang terbeli pada tahun n	Jumlah sarana prasarana yang terbeli pada tahun n	
		Belum optimalnya Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terdapatnya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah sarana prasarana yang terbeli pada tahun n	
		Belum optimalnya Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Belum optimalnya Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terdaftarinya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Jumlah KBBU yang terdaftar pada Dinas Perhubungan	Jumlah KBBU yang terdaftar pada Dinas Perhubungan	
		Belum optimalnya Penyelenggaraan Berkala Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Belum optimalnya Penyelenggaraan Berkala Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Berkala Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Berkala Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bukti lulus uji yang dibeli pada tahun n	Jumlah bukti lulus uji yang dibeli pada tahun n	
		Belum optimalnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Belum optimalnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah sarpras yang dipelihara pada tahun n	Jumlah sarpras yang dipelihara pada tahun n	
4. Persentase ketersediaan fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang jalan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang jalan tipe C dalam kondisi baik / Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan	Belum optimalnya pengelolaan terminal penumpang Tipe C	Meningkatkan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Meningkatnya kualitas terminal penumpang tipe C	Jumlah terminal dalam kondisi baik	Jumlah terminal dalam kondisi baik	Jumlah terminal dalam kondisi baik	
		Belum optimalnya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Belum optimalnya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Tipe C	Jumlah Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Tipe C	Jumlah Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Tipe C	
		Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM terminal (ASN dan Non ASN) yang dilakukan peningkatan kompetensi pada tahun n	Jumlah SDM terminal (ASN dan Non ASN) yang dilakukan peningkatan kompetensi pada tahun n	Jumlah SDM terminal (ASN dan Non ASN) yang dilakukan peningkatan kompetensi pada tahun n	

Sasaran Program (Outcome)	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah PD	Arah Kebijakan PD	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keluaran/Output	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
		Belum optimalnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Meningkatkan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal tipe C yang dipelihara pada tahun n	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi hasil andalalin pada tahun n	
		Belum optimalnya penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	Meningkatkan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya layanan analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		
		Belum optimalnya koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Meningkatkan layanan angkutan umum	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia untuk anak sekolah	
		(jumlah trayek yang dilayani x bobot trayek)/ jumlah kebutuhan trayek x 100%	Belum optimalnya sarana angkutan umum	Meningkatkan layanan angkutan umum	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Realisasi Jumlah rute angkutan sekolah gratis yg dilayani sampai dengan tahun n/target jumlah rute angkutan sekolah gratis yang akan dilayani sampai tahun akhir RPJMDx 100%	Belum optimalnya perencanaan dokumen perencanaan angkutan daerah kabupaten/kota	Menyusun dokumen perencanaan angkutan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia untuk anak sekolah	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Belum optimalnya penyelenggaraan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Menyusun dokumen perencanaan angkutan	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas perencanaan angkutan umum	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Belum optimalnya Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Sasaran Program (Outcome)	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah PD	Arah Kebijakan PD	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keluaran/Output	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
			belum optimalnya penyelenggaraan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan penyelenggaraan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas layanan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	
			Belum Optimalnya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada tahun n	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada tahun n	